**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN,
SEKTRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG
BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, bertanggungjawab dan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dan memperhatikan potensi serta kemampuan daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu menata Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Oraganisasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom Yang Lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati Adalah Bupati Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- f. Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pada Pemerintah Daerah Yang Bertanggungjawab Kepada Kepala Daerah Dan Membantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Terdiri Atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Serta Kecamatan;
- i. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Terdiri Dari :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Asisten 1 (Asisten Bidang Pemerintahan) terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan Umum membawahkan :
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Administrasi Kependudukan;
 3. Sub Bagian Ketertiban Umum.
 - b. Bagian Hukum membawahkan :
 1. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 2. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Bantuan Hukum dan HAM;
 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - c. Bagian Pemerintahan Kampung Dan Kelurahan membawahkan
 1. Sub Bagian Pemerintahan Dan Administrasi Kampung/Kelurahan;

2. Sub Bagian Perangkat Kampung/Kelurahan;
 3. Sub Bagian Pembinaan Dan Pemberdayaan Lembaga Adat Kampung/Kelurahan;
 4. Sub Bagian Pembinaan Pendapatan Dan Kekayaan Kampung/Kelurahan;
3. Asisten II (Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan) terdiri dari:
- a. Bagian Perekonomian terdiri dari
 1. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I;
 2. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II.
 - b. Bagian Pembinaan Program terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program Kerja;
 2. Sub Bagian Pengendalian;
 3. Sub Bagian Pelaporan.
 - c. Bagian Humas Dan Komunikasi terdiri dari:
 1. Sub Bagian Pengumpulan Informasi Dan Dokumentasi;
 2. Sub Bagian Penerbitan Dan Pemberitaan;
 3. Sub Bagian Monitoring Dan Komunikasi.
4. Asisten III (Asisten Bidang Administrasi) terdiri dari:
- a. Bagian Keuangan terdiri dari:
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembukuan;
 3. Sub Bagian Perbendaharaan;
 4. Sub Bagian Gaji Pegawai;
 5. Sub Bagian Verifikasi Dan Kas Daerah.
 - b. Bagian Keuangan terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum Dan Rumah Tangga;
 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Protocol, Sandi dan Telekomunikasi;
 - c. Bagian Keuangan terdiri dari:
 1. Sub Bagian Kelembagaan;
 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 3. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan Dan Pengolahan Data.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris daerah kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten terdiri dari :

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perjalanan;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan
3. Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Humas dan Protokol;
 - c. Sub Bagian Perundang-Undangan/ Perpustakaan.
4. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota;
 - c. Sub Bagian Laporan.

Kedudukan

Pasal 7

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 8

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.